BAB III

OBJEK PENELITIAN

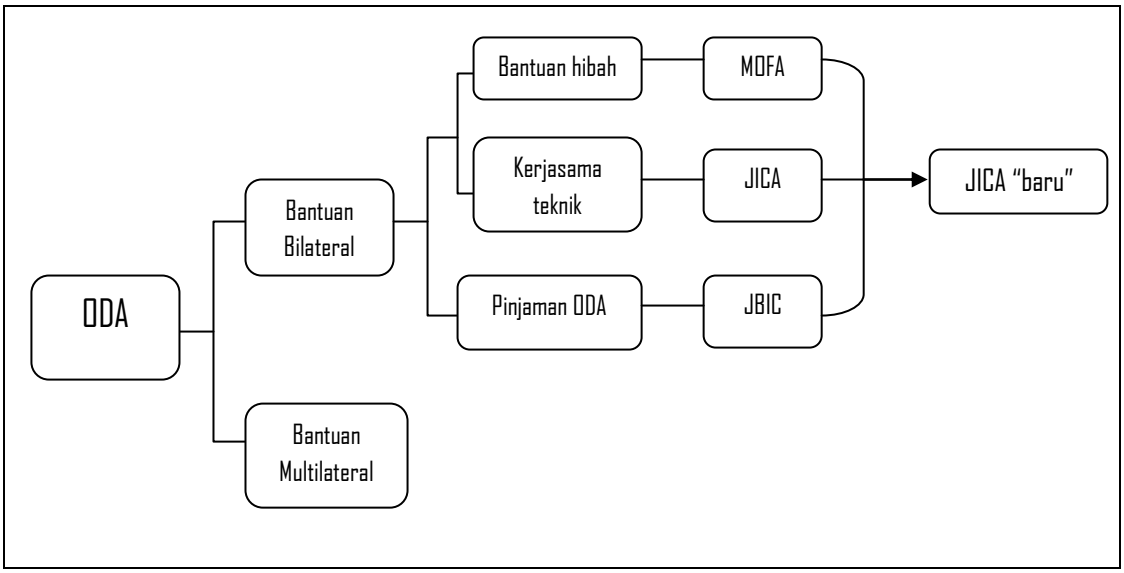
3.1 *Japan International Cooperation Agency* (JICA)

3.1.1 Latar Belakang Terbentuknya JICA

Sejak keikutsertaannya dalam *Colombo Plan* pada tahun 1954, pemerintah Jepang terus meningkatkan berbagai kerjasama dengan memanfaatkan dana dan teknologi yang dimilikinya melalui kerangka Bantuan Pembangunan Resmi atau *Official Development Assistance* (ODA). Bantuan tersebut diberikan kepada negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah yang dihadapi seperti kelaparan dan kemiskinan serta kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Berbagai kerjasama teknik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan negara-negara lain salah satunya yaitu Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, kerangka kerjasama teknik lebih terstruktur dan akhirnya pemerintah mendirikan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada 1 Agustus 1974. JICA merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. Pada awal berdirinya JICA hanya memiliki fungsi sebagai lembaga kerjasama yang secara khusus bertugas untuk menyalurkan bantuan teknik saja namun pada bulan Oktober 2008, JICA melakukan merjer dengan bagian operasi kerjasama ekonomi luar negeri dari *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) menjadi JICA baru. Sejak saat itu JICA mendapatkan tugas untuk melaksanakan

tiga Bantuan Pembangunan Resmi atau *Official Development Assistance* (ODA) yaitu Bantuan Hibah, Kerjasama Teknik, dan Pinjaman ODA. Tujuan dari pembentukan JICA sejak awal ialah untuk mempromosikan kerjasama internasional bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang. Saat ini JICA merupakan badan bantuan bilateral terbesar di dunia dengan besaran anggaran sekitar 10 milyar USD dan beroperasi di sekitar 150 negara di dunia.



Sumber: Buletin JICA di Indonesia, 2008: 7

Bagan 3.1
Penyaluran ODA Jepang melalui JICA "Baru"

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa JICA dengan format yang baru bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan hibah, kerjasama teknik, serta pinjaman ODA. Meskipun dalam bagan digambarkan bahwa bantuan hibah disalurkan melalui JICA, akan tetapi beberapa jenis bantuan hibah akan tetap diberikan langsung oleh DEPLU Jepang (melalui kantor Kedutaan Besar) dalam rangka kebijakan diplomatik.

Dalam perubahannya, JICA juga telah membuat Visi serta Misi yang baru sebagai komitmen dalam mencapai tujuannya. Dan untuk mencapai tujuannya, JICA merumuskna Visi serta Misinya sebagai berikut :

1. Visi *Japan International Cooperation Agency*

   Visi dari JICA ialah Pembangunan yang Inklusif dan Dinamis. Dalam artiannya, JICA akan berusaha mempromosikan pembangunan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

2. Misi *Japan International Cooperation Agency*

   1. Fokus pada Agenda Global, pemanfaatan pengalaman dan teknologi yang dimiliki Jepang secara maksimal, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan memfokuskan perhatiannya pada berbagai permasalahan global yang dihadapi oleh negara-negara berkembang secara menyeluruh, seperti perubahan iklim, penyakit menular, terorisme, dan krisis ekonomi.
   2. Pengentasan kemiskinan Melalui Pertumbuhan yang Berkeadilan, menyediakan dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan kapasitas, peningkatan kebijakan dan institusi, serta penyediaan prasarana sosial dan ekonomi.
   3. Peningkatan Tata Pemerintahan, menawarkan bantuan bagi peningkatan berbagai pranata/perangkat dasar yang dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan, serta berbagai sistem pelayanan umum yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat secara efektif, serta dukungan bagi

pengembangan institusi dan SDM yang diperlukan untuk mengelola berbagai pranata tersebut.

4. Pencapaian Ketahanan Manusia, mendukung berbagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas sosial dan institusi serta peningkatan kemandirian dan kemampuan diri manusia dalam menghadapi berbagai ancaman (Bulletin JICA di Indonesia, 2008:8).

3.1.2 Kegiatan-kegiatan JICA

Sejak awal didirikannya, JICA telah banyak membantu proses pembangunan negara-negara berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hingga kini, JICA telah melakukan kerjasama bilateral dengan 150 negara hal tersebut menjadikan JICA sebagai salah satu lembaga pemberi bantuan bilateral terbesar di dunia. Kegiatan-kegiatan JICA bagi negara-negara berkembang diantaranya sebagai berikut :

1. Kerjasama Teknik
    1) Program Pelatihan teknik

Program pelatihan teknik ialah suatu program dimana Jepang menerima peserta yang berasal dari negara berkembang untuk kemudian di latih di negara Jepang dengan lama pelatihan ialah satu tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan di berbagai bidang seperti tata niaga, pengawasan mutu, perlindungan lingkungan dan teknik konstruksi bangunan.

Pelatihan diadakan di pusat-pusat pelatihan JICA yang ada di seluruh wilayah Jepang. Pelatihan ini juga diselenggarakan melalui kerjasama dengan

badan-badan pemerintah nasional dan pemerintah daerah, pusat-pusat pelatihan dan penelitian swasta, universitas-universitas dan lembaga-lembaga lainnya. Ada dua tipe program pelatihan JICA, yaitu :

a) Pelatihan yang diadakan di Jepang

Pelatihan yang diadakan di Jepang terbagi ke dalam dua bentuk yaitu perorangan dan kelompok. Pelatihan perorangan dipersiapkan secara terpisah dengan syarat khusus peserta program ini juga ditawarkan ke badan-badan internasional sesuai dengan pemerintah. Sedangkan untuk pelatihan dalam bentuk kelompok, persiapan diadakan setahun sebelum program ini dilaksanakan. Syarat dan prosedur lamaran diberitahukan keseluruh negara yang bersangkutan. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 10 peserta pelatihan.

b) Pelatihan yang dilakukan di negara berkembang

Selain mengadakan pelatihan di Jepang, JICA juga menyelenggarakan pelatihan di negara-negara berkembang dengan mendatangkan peserta dari negara-negara berkembang kawasn Asia dan Afrika yang telah maju dengan dukungan biaya dari pihak JICA dengan harapan kelak mereka dapat memimpin negaranya di tahun-tahun yang akan datang ke Jepang melalui *Youth Invitation Program*. Tujuan dari program ini adalah agar peserta dapat lebih mengenal jepang serta menjembatani persahabatan yang akan terjalin antara generasi-genarasi baru di setiap negara serta meningkatkan rasa saling pengertian dalam pembangunan serta untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Aktivitas yang dilakukan dalam menjalani pelatihan ini sangat beragam diawali dangan mengenal

negara Jepang, mengikuti seminar-seminar, serta adanya pelatihan lapangan bersama dengan masyarakat setempat.

2) Pengiriman tenaga ahli

Pengiriman tenaga ahli telah dimulai sejak tahun 1955 diawali dengan ditugaskannya 28 tenaga ahli ke wilayah Asia. Sejak saat itu pengiriman tenaga ahli menjadi sangat penting terutama dalam kerjasama teknik yang dilakukan oleh Jepang. Tujuan dari program ini adalah menyebarkan pengetahuan serta penguasaan terhadap teknologi yang sesuai dengan kebutuhan negar-negara berkembang. Pengiriman tenaga ahli ini terbagi ke dalam 2 tipe yaitu :

a) *Individual expert*, para ahli yang ditugaskan dikirim berdasarkan atas permintaan negara berkembang yang akan ditugaskan di departemen-departemen, pusat-pusat pelatihan, dan lembaga pendidikan pemerintah sebagai pengajar atau pelatih bagi tenaga ahli setempat.
b) *Project expert*, pengiriman tenaga ahli yang dikirim untuk proyek-proyek yang dijalankan oleh JICA di luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi berbaga permintaan terhadap tenaga ahli yang handal, JICA mengirimkan tenaga ahli berdasarkan pada perjanjian yang telah dibuat dengan pemerintah setempat ataupun perusahaan-perusahaan swasta.

3) Pengadaan peralatan

Pengadaan peralatan bertujuan unutk menunjang kinerja para tenaga ahli yang dikirim oleh Jepang ke negara-negara berkembang. Peralatan yang disediakan biasanya diberikan bersama dengan program kerjasama yang digunakan. Misalnya untuk memudahkan ahli teknologi dari JICA, membantu

para mitra negara penerima bantuan untuk melanjutkan pekerjaan mereka setelah para tenaga ahli kembali ke Jepang, atau untuk membantu para mantan peserta yang pernah ikut dalam pelatihan di jepang agar apat memanfaatkan pengetahuan serta keahlian yang diperoleh dari hasil pelatihan.

Kerjasama teknik dapat dikatakna sukses apabila tenaga ahli beserta peralatan yang ada dapat bekerja secara efektif selain itu, adanya alih teknologi yang baik dengan negara penerima bantuan.

4) Kerjasama teknik tipe proyek

Sebagai upaya penyempurnaan dari kerjasama teknik yang dilakukan, maka JICA melaksanakan kerjasama teknik tipe proyek (*project type technical cooperation program*). Program ini memberikan bantuan terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penilaian dengan cara memadukan program pelatihan di Jepang, pengiriman tenaga ahli serta pengadaan peralatan. Proyek kerjasama teknik dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu :

- Pengembangan sosial melalui kemajuan dibidang ilmu dan teknologi seperti elektronik, telekomunikasi, transportasi, jaringan lalu lintas perkotaan, industri kecil dan pelatihan keterampilan.
- Kesehatan, kedokteran, kependudukan, dan Keluarga Berencana.
- Pertanian, kehutanan, perikanan.
- Pengembangan industri termasuk pengembangan industri setempat, pemanfaatan ekonomis sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja.

5) Program studi pengembangan

Program studi pembangunan JICA bertujuan untuk memberikan bantuan bagi perumusan rencana pembangunan. Tim studi yang dikirim terdiri dari konsultan ahli yang memeriksa kelayakan proyek yang dilanjutkan, tidak hanya dari segi teknis dan keuangan mereka, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial, organisasi dan pengelolaan dampak lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Selain memberikan konsultasi, tim studi juga memberikan praktek kerja bagi tenaga pendamping negara penerima bantuan dan mengundang mereka ke Jepang untuk latihan lebih lanjut di bidang-bidang seperti pengawasan, analisis dan perencanaan.

6) Pengiriman tenaga ahli muda atau *Japan Overseas Cooperation Volunteers* (JOCV)

Program JOVC yang dibentuk pada tahun 1985 merupakan program resmi pemerintah Jepang untuk mengirim tenaga ahli mudanya melalui JICA ke negara-negara berkembang. Sampai saat ini, JICA telah mengirim lebih dari 14.000 pemuda-pemudi Jepang ke 61 negara-negara berkambang terutama di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, Oceania, dan Eropa Timur untuk meningkatkan persahabatan dengan memperdalam pengertian antara bangsa.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu pembangunan social ekonomi masyarakat setempat. Tenaga ahli muda ini adalah pemuda-pemudi Jepang pilihan berumur 20-40 tahun, yang hidup dan bekerja di negara-negara yang ditugaskan selama jangka waktu 2 tahun.

7) Penerimaan dan pelatihan tenaga berkualitas

Tahun 1983, JICA membentuk *The Institute for International Cooperation* (IFIC) dengan tujuan untuk memperkuat organisasi dan fungsi-fungsi kerjasama tekniknya. Lembaga ini menerima dan melatih para ahli dalam kerjasama teknis mengadakan survey dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan menyediakan informasi mengenai dokumen kerjasama internasional.

2. Program Bantuan Hibah

Program bantuan hibah adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada negara-negara berkembang sesuai dengan perjanjian bilateral, tanpa ada kewajiban untuk membayar kembali. Sasaran utama dari bantuan hibah pemerintah Jepang adalah kebutuhan dasar yang meliputi perawatan, kesehatan, kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih, pembangunan pertanian dan pedesaan, dan juga mengembangkan sumber daya manusia JICA memberikan dukungan khusus dalam pelaksanaan bantuan hibah agar berjalan lancar, memastikan program kerjasama secara keseluruhan terlaksana dengan baik.

Bantuan hibah Jepang memiliki Sembilan kategori : bantuan hibah umum, bantuan hibah untuk perikanan, bnatuan hibah untuk bencana, bantuan hibah kegiatan budaya, bantuan hibah untuk peningkatan produksi pangan, bantuan hibah pangan, bantuan hibah skala kecil, bantuan hibah non proyek, dan bantuan hibah untuk masalah hutang (www.jica.go.jp. Diakses pada 5 April 2010).

Negara-negara yang menjalin kerjasama dengan pihak JICA dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Negara-negara yang Memiliki Kantor Perwakilan JICA

Asia	**Afrika**	**North-Amerika Latin :**
Bangladesh	Bostwana	Argentiana
Bhutan	Burkina faso	Belize
Cambodia	Ivory coast	Bolivia
China	Djibouti	Brazil
India	Ethiopia	Chili
Indonesia	Ghana	Colombia
Kyrgiztan	Kenya	Costa rica
Laos	Madagaskar	Dominica
Malaysia	Malawi	Republic dominika
Maldives	Mozambique	Ekuador
Mongolia	Niger	El Salvador
Myanmar	Nigeria	Guatemala
Nepal	Senegal	Honduras
Pakistan	South Africa	Jamaica
Philipina	Tanzani	Mexico
Singapura	Uganda	Nikaragua
Sri langka	Zambia	Panama
Thailand	Zimbabwe	Paraguay
Timor-leste		Peru
Uzbekistan	**Ocenia :**	St. Vincent
Vietnam	Fiji	St. Lucia
	Marshall island	Uruguay
Timur Tengah :	Micronesia	Venzuela
Afganistan	Palau	
Egypt	Papua new guenie	**Eropa :**
Jordan	Samao	Austria
Morocco	Solomon Island	Bulgaria
Saudi Arabia	Tonga	France
Syiria	Vanuatu	Hungary
Tunisia		Poland
Turkey		Romania
Gaza		UK.

Sumber : www.jica.go.jp (diakses pada 5 April 2010).

3.2 Gambaran Umum Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam

menghadapi era globalisasi. Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan hingga kini. Salah satu upaya pemerintah ialah dengan menetapkan standar kualitas pendidikan dengan harapan agar terjadi pemerataan pencapain kualitas pendidikan di setiap daerah di Indonesia. Standar mengenai kualitas pendidikan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar kualitas pendidikan tersebut telah dicapai di beberapa wilayah di Indonesia namun sebagian wilayah lainnya belum menunjukan pencapaian tersebut terutama di kawasan timur Indonesia dan salah satu wilayah yang belum memenuhi standar kualitas pendidikan ialah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi dalam hal pendidikan di beberapa wilayah, pemerintah Indonesia khususnya kementrian pendidikan membangun kerjasama dengan pemerintah Jepang yang di representasikan oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk meningkatkan bantuannya untuk Kawasan Indonesia Timur, yang merupakan wilayah yang masih belum begitu dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Bantuan dari pemerintah Jepang dikonsentrasikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan penghubung Kawasan Indonesia Timur yang dinilai memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut (Buletin JICA di Indonesia. 2008:18).

3.2.1 Masuknya JICA ke Indonesia

Sejak tahun 1954 Jepang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia diawali dengan kerjasama tenik seperti pengiriman tenaga ahli dari Jepang dan program pelatihan yang dilaksanakan secara langsung di negara Jepang. Kerjasama tersebut berlanjut hingga tahun 1970-an dan pada tahun 1974 pemerintah Jepang secara resmi membentuk JICA untuk menjalankan kerjasama Teknik. Sejak saat itu, dimulailah kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang melalui JICA. Kantor perwakilan JICA di Indonesia pada awalnya merupakan kantor perwakilan dari Badan Kerjasama Teknik Luar Negeri atau *Overseas Technical Cooperation Agency* (OTCA) yang kemudian berubah nama menjadi Badan Kerjasama Internasional Jepang atau *Japan International Cooperation Agency* (JICA).

JICA di Indonesia merupakan salah satu yang tertua dan terbesar di antara sekitar 150 kantor perwakilan JICA yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang terbesar berdasarkan besaran jumlah dana yang telah disalurkan secara kumulatif sampai TA Jepang 2007 dimana telah terkirim 35.630 peserta Indonesia untuk mengikuti program pelatihan di Jepang dan 11.108 tenaga ahli Jepang telah ditugaskan di Indonesia. Secara lebih jelas, kerjasama JICA dengan pemerintah Indonesia dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.1(1)

Sejarah Masuknya JICA di Indonesia

Tahun	Pelaksanaan Kerjasama
1974	Perubahan OTCA menjadi Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA)[a]
1976	Dimulainya pemberian Bantuan Hibah sebagai skema umum ODA Jepang[b]
1981	Dimulainya dukungan bagi Program Pelatihan Internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia (Dukungan bagi Kerjasama Selatan-Selatan)[a]
1984	Dimulainya Indonesia mengikuti Program Persahabatan Pemuda[a]
1986	Dimulainya Bantuan Khusus untuk Kesinambungan Proyek (SAPS)[c]
1988	Dimulainya Bantuan Khusus untuk Perancangan Proyek (SAPROF)[c] Dimulainya Penugasan Tenaga Ahli Muda (JOCV) Jepang di Indonesia[a]
1992	Dimulainya Bantuan Khusus untuk Pelaksanaan Proyek (SAPI)[c]
1996	Dimulainya Bantuan Khusus untuk Kebijakan dan Proyek Pembangunan (SADEP)[c]
1997	Dimulainya dukungan terhadap krisis moneter dalam bentuk pemberian Bantuan Pangan kembali[c]
1998	Dimulainya Penugasan Tenaga Ahli Silver (SV) Jepang di Indonesia[a] Dimulainya Program Pemberdayaan Masyarakat (CEP) di Indonesia (melalui kerjasama dengan LSM Indonesia)[a]
1999	Pembentukan Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC)[c]
2001	Dimulainya Program Kemitraan JICA (JPP) di Indonesia (memfasilitasi kerjasama antara LSM Jepang dan Indonesia)[a]
2003	Restrukturisasi JICA sebagai institusi publik yang mandiri[a]
2008	JICA merger dengan JBIC membentuk JICA ”baru" yang dapat memberikan dukungan dalam bentuk Kerjasama Teknik, Pinjaman ODA, dan Bantuan Hibah

Sumber : Buletin JICA di Indonesia. 2008: 21

Keterangan Tabel 3.2.1 (1) : (a) kerjasama teknik; (b) bantuan hibah; (c) pinjaman ODA. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pemerintah Indonesia telah lama melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang yang akhirnya menjadi dasar atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan JICA. Dari tabel diatas juga dapat terlihat bahwa kerjasama yang dibangun antar pemerintah Jepang dan

Indonesia lebih banyak merupakan kerjasama teknik. Sejak dibentuknya JICA pada tahun 1974 hingga tahun 2008, JICA hanya menyalurkan bantuan teknik namun setelah dibentuknya JICA baru, semua bentuk bantuan disalurkan oleh JICA. Pada tahun 2008 JICA melakukan merger bersama *Japan Bank Internatonal Cooperation* (JBIC). Dengan dilaksanakannya merger tersebut, JICA tidak hanya bertanggungjawab atas penyaluran bantuan kerjasama teknik saja, tetapi juga terhadap bantuan pinjaman ODA serta bantuan hibah.

Dalam merealisasikan bantuannya untuk Indonesia, JICA merumuskan program bantuan yang kemudian disebut *Country Assistance Strategy* atau Strategi Bantuan Pemerintah Jepang. *Country Assistance Strategy* yang dibuat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar Strategi Bantuan yang dibuat dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia sesuai dengan fungsinya bahwa JICA memberikan bantuan bagi pembangunan Negara berkembang. *Country Assistance Strategy* yang dibuat dititik beratkan pada empat bidang prioritas kerjasama. Bidang-bidang kerjasama tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.1 (2)

***Country Assistance Strategy* JICA**

Bidang Prioritas	Isu Pembangunan	Program Kerjasama JICA
Kesinambungan Pertumbuhan Ekonomi yang Digerakkan oleh Sektor Swasta	Kebijakan Ekonomi	Kebijakan Ekonomi, Fiskal, dan Keuangan
	Pengembangan Prasarana Ekonomi	- Pembangunan Prasarana Transportasi - Penyediaan Energi - Mempromosikan Skema Kemitraan Pemerintah dan

		Swasta - Pengembangan Usaha Sektor Swasta
	Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi	- Pengembangan Usaha Sektor Swasta - Dukungan Bagi Sarana Perdagangan dan Logistik - Peningkatan Sistem Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi - Pengenbangan bidang Pendidikan Tinggi
Menciptakan Masyarakat yang Demokratis dan Berkeadilan	Pengentasan Kemiskinan	- Peningkatan Pendidikan Dasar dan Menengah - Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Medis - Penyediaan Air dan Sanitasi - Stabilitas Penyediaan Pangan
	Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	- Pembangunan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan - Pembangunan Wilayah bagian Timur Laut Indonesia
	Reformasi Tata Pemerintahan	- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Perdamaian dan Stabilitas	Perdamaian dan Stabilitas	- Penanganan Bencana - Keamanan Transportasi
Lingkungan	Lingkungan	- Perubahan Iklim - Pelestarian Lingkungan Alam - PeningkatanPerkotaan Kualitas Lingkungan

Sumber: Buletin JICA di Indonesia, 2008: 11

Dari *Country Assistance Strategy* yang diuraikan pada tabel diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada bidang Peningkatan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikhususkan di kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan.

Sejauh ini proyek kerjasama JICA di Indonesia umumnya dibentuk berdasarkan permintaan dari pemerintah pusat. Akibatnya ada kecenderungan proyek tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah di berbagai daerah di Indonesia dengan koordinasi yang lemah oleh instansi sektoral tunggal. Oleh

sebab itu dipandang penting untuk merencanakan dan melaksanakan kerjasama pembangunan daerah bukan oleh satu proyek sektoral tapi secara komprehensif dalam satu payung program oleh beberapa sektor dalam satu wilayah sebagai satu kesatuan khususnya dalam rangka mendukung usaha pemerintah daerah dalam reformasi tata pemerintahan yang semakin mendapat penekanan dala era otonomi daerah. Disisi lain pembangunan bagian timur Indonesia telah menjadi isu penting dalam serangkaian program pembangunan nasional dan saat ini bisa dilihat pada rencana "Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah" yang merupakan salah satu prioritas pembangunan dan arah kebijakan dalam agenda "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" pada RPJMN 2005-2009. Pada saat yang sama Starategi Bantuan Jepang untuk Indonesia difokuskan pada pengentasan kemiskinan dalam upaya pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis sebagai salah satu pilar dari empat pilar bantuannya. Oleh sebab itu dirasakan tepat mendukung pembangunan Wilayah Timur Indonesia.

Dalam kerangka pemikiran tersebut dan berdasarkan sudut pandang pentingnya pemilihan lokasi dan konsentrasi kegiatan menuju kerjasama yang lebih efektif dan efisien di Indonesia maka JICA menegaskan pentingnya usaha penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan daerah dilaksanakan secara intensif di bagian Timur Indonesia. Berdasarkan hal ini JICA menformulasikan kerangka dasar program dukungan untuk pembangunan bagian timur Indonesia yang terdiri dari program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan program pembangunan daerah Indonesia Timur Laut. Dalam rangka mengelola dan melaksanakan kedua program tersebut dan juga untuk menerapkan

manajemen berbasis lapangan, maka JICA *Makasar Field Office* (JICA MFO) dibuka secara resmi di Makasar pada April 2006 (Berita PRIMA P, Siklus 2. 2009:2).

3.2.2 Kondisi Pendidikan di Sulawesi Selatan

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari tiga sub-program yaitu :

1) Pembangunan perkotaan sebagai motor penggerak untuk pembangunan daerah provinsi.
2) Pembangunan ekonomi yang seimbang.
3) Pemberdayaan sosial.

Berkaitan dengan sub-program yang ketiga yaitu pemberdayaan sosial, maka pendidikan merupakan bagian penting dalam menjalankan sub-program tersebut. Dalam hal pendidikan dasar, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target tahunan dalam hal peningkatan kualitas pendiidkan sesuai dengan standar kualitas pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain hal tersebut sejumlah masalah mengenai pendidikan masih banyak yang harus diperbaiki seperti kualitas guru yang masih rendah sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk mencapai tujuan nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta minimnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan (http://www.sulsel.go.id/indo/index.php) diakses tanggal 8 Juni 2010.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan selalu berupaya untuk memperbaiki keadaan tersebut melalui berbagai macam program serta kegiatan pendidikan yang diharapkan dapat memperbaiki hal tersebut namun tetap saja upaya yang telah dilakukan dirasa masih kurang dan terkadang mencipatakan permasalahan yang baru. Kondisi pendidikan di perburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pendidikan. Hal tersebut terlihat di beberapa kabupaten yang tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam penentuan kebijakan.

3.2.3.1 Kondisi Pendidikan di Kabupaten Barru

Kondisi pendidikan di Kabupaten Barru dapat dikatakan masih rendah dilihat dari ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dilihat dari segi kualitas yang mengacu kepada standar nasional pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Dilihat dari standar isi atau yang berkaitan dengan kesiapan materi dari hasil survey, sebagian besar peserta didik tidak memiliki silabus pembelajaran serta buku paket sebagai materi pegangan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Hal tersebut tentu berkaitan dengan suasana proses pembelajaran dikelas dimana pendidikan hanya terjadi satu arah yang dalam artiannya tidak melibatkan peserta didik secara aktif. Selain itu, dari egi proses pembelajaran masih adanya beberapa tenaga pendidik yang yang tidak menggunakan media dalam mengajar seperti media audio-visual ataupun media lain seperti map

ataupun alat peraga sehingga berpengaruh terhadap pemahaman siswa terkait dengan materi yang disampaikan.

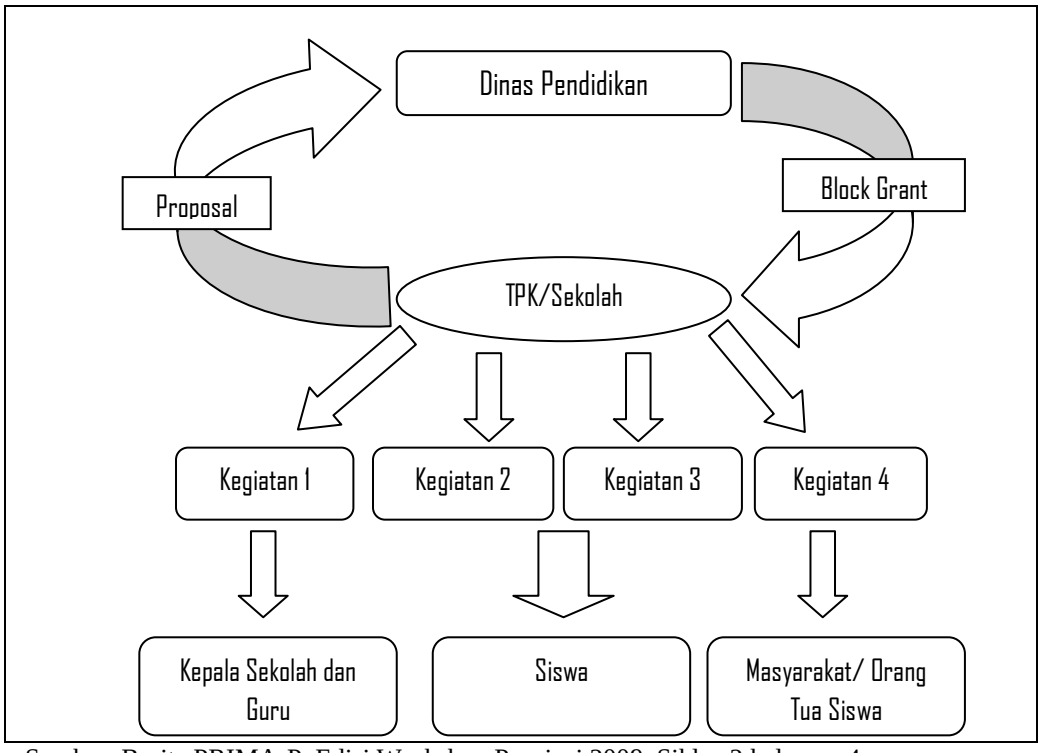
Keterbatasan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan juga berpengaruh terhadap standar kompetensi lulusan dari segi akademis yang bisa dilihat dari hasil prestasi yang dicapai oleh siswa selain itu, standar kompetensi lulusan juga meliputi sikap dimana masih rendahnya *attitude*, serta minimnya keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik di kabupaten Barru. Untuk standar pendidik meski jumlah tenaga pendidik memenuhi standar kebutuhan namun dari jumlah tersebut masih ada tenaga pendidik yang tidak memiliki sertifikasi dan kurangnya kesadaran tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal sarana dan prasarana seperti ruang belajar yang perlu diperbaiki, minimnya buku pegangan siswa serta minimnya computer sebagai penunjang proses pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, tempat berolahraga dan ibadah, perpustakaan serta laboratorium. Ketimpangan kondisi pendidikan di kabupaten Barru juga dapat dilihat dari segi pengelolaan serta pembiayaan dimana segala kegiatan pendidikan tidak diawasi oleh pihak-pihak di luar sekolah dengan baik. Dari penjelasan kondisi tersebut, tentu kualitas pendidikan dikabupaten Barru dikatakan masih rendah (*Baseline Survey Report*, 2009:10-26).

Hal tersebut yang melatar belakangi kerjasama *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dengan pemerintah Kabupaten Barru melalui program PRIMA Pendidikan (PRIMA-P) yang dikhususkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

3.2.3.2 Program PRIMA Pendidikan di Kabupaten Barru

Sesuai dengan salah satu pilar dalam membangun kerjasama JICA dengan pemerintah Indonesia yaitu pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis khususnya provinsi Sulawesi Selatan salah satunya dalam bidang pendidikan, JICA bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membuat suatu program yaitu PRIMA Pendidikan atau PRIMA-P. Nota kesepahaman untuk memulai program tersebut secara resmi ditandatangani oleh JICA, Dinas Pendidikan Provinsi dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Agustus 2007.

Dalam penerapannya, PRIMA-P memiliki strategi yang akan mengembangkan sebuah model peningkatan pendidikan menengah pertama secara terpadu dalam hal akses, kualitas dan manajemen di sekolah, kecamatan, kabupaten dan provinsi, melalui rencana kegiatan. Pelaksanaan program PRIMA-P melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal tersebut merupakan gambaran bahwa masalah pendidikan bukan hanya tanggungjawab pihak sekolah tetapi menrupakan tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Strategi tersebut digambarkan melalui bagan berikut ini:



Sumber: Berita PRIMA-P, Edisi Workshop Provinsi 2009, Siklus 2 halaman 4

Bagan 3.2.3.2

Strategi Pelaksanaan Program PRIMA Pendidikan

Bagan diatas menjelaskan bagaimana pelaksanaan program PRIMA-P. *Block Grant* yang diberikan oleh dinas pendidikan kepada TPK/Sekolah merupakan dana yang berasal dari JICA. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang memliki target yang berbeda seperti kepala sekolah dan guru, siswa, serta masyarakat atau orang tua siswa. Segala bentuk kegiatan tersebut, kemudian dilaporkan kembali kepada dinas pendidikan yang kemudian akan dievaluasi secara bersama-sama. Evaluasi tersebut dilakukan dengan tujuan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target atau belum. Bagan diatas merupakan gambaran secara garis besar

pelaksanaan dari program PRIMA-P. Secara lebih rinci berikut penjelasan program PRIMA-P.

1. Ringkasan Program

Pogram PRIMA Pendidikan atau PRIMA-P adalah sebuah program kerjasama teknis yang diimplementasikan berama-sama oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Program PRIMA-P ditargetkan bagi sekolah menengah pertama. Dalam pelaksanaanya program PRIMA-P menerapkan 2 metode yaitu *Regional Education Development and Improvement Program* (REDIP) serta *Lesson Study*. Metode REDIP bertujuan untuk meningkatkan manajemen berbasis sekolah sedangkan metode *Lesson Study* bertujuan untuk perkembangan profesionalitas guru dalam proses belajar mengajar di ruang kelas.

Program PRIMA-P dilakukan selama tiga (3) tahun, yang dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Seluruh kegiatan ini dibagi kedalam 3 siklus sesuai dengan sistem tahun ajaran yang berlaku di Indonesia yaitu :

- Siklus 1: Januari 2008 – Juni 2008
- Siklus 2 : September 2008 – Juni 2009
- Siklus 3 : September 2009 – Juni 2010

Siklus 1 hanya mencakup enam bulan pelaksanaan, di mana hanya dua atau dua setengah bulan diantaranya yang tersedia bagi TPK dan sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Karena keterbatasan waktu tersebut, maka jumlah *Block Grant* yang disediakan untuk Siklus 1 pun dikurangi hingga 40%

dari jumlah standar. Alokasi *Block Grant* PRIMA-Pendidikan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.3.2 (1)

Alokasi *Block Grant* PRIMA-Pendidikan Kabupaten Barru per Siklus

Block Grant (Rp.) Siklus I		**Block Grant (Rp.) Siklus II**		**Block Grant (Rp.) Siklus III**	
4 TPK	59,500,000	4 TPK	149,000,000	4 TPK	182,000,000
22 Sekolah	218,732,000	23 Sekolah	540,860,000	24 Sekolah	578,730,000
	273,232,000		**734,860,000**		**760,730,000**

Sumber : Rencana Terpadu Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama Di Povinsi Sulawesi Selatan, hal 12

2. Tujuan dari Program

Tujuan dari program ini adalah peningkatan pendidikan menengah pertama dalam hal kuantitas, kualitas, dan manajemen pada tiga kabupaten yang menjadi target pelaksanaan program. Sasaran keseluruhan dari program ini ialah untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan pelayanan pada sektor pendidikan di Sulawesi Selatan. Hasil yang diharapkan dari program ini berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara JICA dengan pemerintah setempat adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi masyarakat terhadap sekolah-sekolah pendidikan menengah pertama dapat ditingkatkan.
2) Pembelajaran dengan menggunakan proses belajar-mengajar yang berbasis kebutuhan dapat dilaksanakan pada seolah-sekolah pendidikan menengah pertama yang menjadi target.

3) Pegawai dinas pendidikan pada kabupaten-kabupaten target dan pemerintah provinsi dapat mengembangkan kapasitas mereka untuk mengelola dan menjalankan kegiatan-kegiatan peningkatan pendidikan dengan peran dan tanggungjawab yang jelas.

3. Lokasi dan Cakupan

Program PRIMA-P ini akan dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga kabupaten tersebut ialah kabupaten Barru, Jeneponto, dan Wajo. Dari tiga kabupaten tersebut, telah terpilih 17 kecamatan dari jumlah keseluruhan kecamatan yaitu 32 kecamatan. Program ini mencakup semua jenis sekolah tingkat menengah pertama di kecamatan target yaitu SMP Negeri dan Swasta, MTs Negeri dan Swasta dan SMP terbuka. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian hanya pada kabupaten Barru. Daftar nama kecamatan dan jumlah sekolah target berdasarkan setiap siklus ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.3.2 (2)
Kecamatan Target dan jumlah Sekolah per Siklus

Kabupaten	**Kecamatan**	**Jumlah Sekolah**		
		Siklus I	**Siklus II**	**Siklus III**
Barru	Tante Riaja	7	7	7
	Barru	4	5	5
	Balusu	6	6	7
	Mallusetasi	5	5	5
Total	*4 dari 17 kecamatan*	*22*	*23*	24

Sumber : *Rencana Terpadu Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama Di Sulawesi Selatan (PRIMA Pendidikan). Laporan Kemajuan 3*. Hal 4

4. Pihak-pihak yang Terlibat

Terdapat empat lapisan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PRIMA-P diantaranya :

a. Kantor Program Provinsi
b. Tim Implementasi Kabupaten (TIK)
c. Tim Pengembangan Pendidikan Kecamatan (TPK)
d. Tim Sekolah PRIMA-P

Tim Implementasi Kabupaten (TIK) terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten, BAPPEDA, Kandepag Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten. TPK adalah sebuah organisasi dimana guru/ dinas-dinas yang terkait dengan pendidikan, dan orangtua / masyarakat bertemu dan bekerjasama untuk meningkatkan pendidikan di kecamatan. Anggotanya termasuk kantor camat, kantor cabang dinas, kepala desa, kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah yang aktif, orangtua, tokoh masyarakat, tokoh pendidik setempat (Rencana Terpadu Peningkatan Pendidikan Mnengah Pertama di provinsi Sulawesi Selatan PRIMA Pendidikan. 2008:1-8).

3.3 Kabupaten Barru

3.3.1 Letak Geografis

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau,Bersih,Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" -

119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 dan mempunyai batas - batas wilayah:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan selat Makassar.

Kabupaten Barru berada pada daerah lintasan perekonomian utara-selatan Sulawesi Selatan selain itu juga merupakan wilayah trans Sulawesi yang berfungsi sebagai pintu perekonomian yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengn Kalimantan Timur, Kalimantan selatan dan Jawa Timur. Potensi geografis ini memungkinkan untuk pengembangan berbagai potensi yang dimiliki baik potensi sosial budaya maupun ekonomi (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Barru 2005-2010).

3.3.2 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah bersama – sama masyarakat untuk secara aktif mendorong laju pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan diberlakukannya Undang - undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , maka Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong

pembangunan daerah, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perencanaan dan kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang ada didaerah, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia. Berikut merupakan paparan mengenai visi serta misi pembangunan kabupaten Barru :

1. Visi Pembangunan

   Dengan semangat kebersamaan yang bernafaskan keagamaan,, kita wujudkan kabupaten barru yang maju, sejahtera dan bermartabat.

2. Misi Pembangunan

   Berdasarkan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Pertama, meningkatkan pengamalan Pancasila dan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif (aman, tertib, dan nyaman) yang mendorong investasi dan peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan
- Ketiga, menciptakan interkoneksitas dengan wilayah lain dan kemitraan yang sinergis atau saling menguntungan antar pelaku ekonomi dan dunia usaha dengn prinsip kesetaraan sebagai perwujudan demokratisasi ekonomi
- Keempat: meningkatkan peran aparatur sebagai pelayan kepentingan masyarakat, motivator, dinamisator, dan aktivator untuk membangkitkan semangat dan peran serta masyarakat sebagai aktor pembangunan.

3. Strategi Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemeirntah kabupaten Barru menetapkan strategi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2) Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, percepatan pembngunan wilayah dan peningkatan jaringan sarana dan perasarana.
3) Peningkatan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.
4) Optimalisasi penerapan *good governance* (Pemerintahan yang baik).

4. Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan strategi pembangunan daerah, maka pemerintah kabupaten Barru menjelaskan ke dalam kebijakan pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
    - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan keluarga berkualitas.
    - Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
    - Peningkatan kualitas tenaga kerja
    - Optimalisasi pelayanan sosial
    - Percepatan penanggulangan kemiskinan
    - Peningkatan implementasi nilai budaya lokal

- Peningkatan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
- Percepatan pengurangan terjadinya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan
- Optimalisasi sistem informasi dan pelayanan kependudukan
- Peningkatan pembinaan / pemberdayaan pemuda dan olah raga

2. Peningkatan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    - Mempertahankan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif
    - Peningkatan sosialisasi, legislasi dan pelaksanaan peraturan daerah
    - Peningkatan komunikasi politik untuk mendorong perwujudan demokrasi
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana.
    - Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, kelautan dan ketahanan pangan
    - Peningkatan ketersediaan infrastruktur ekonomi baik perangkat lunak maupun perangkat keras
    - Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
    - Peningkatan efesiensi penataan ruang
    - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan kelautan

- Optimalisasi peran swasta dan pelaku ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Mendorong pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah dan industri rumah tangga kecil dan menengah
- Peningkatan pemanfaatan potensi kepariwisataan

4. Optimalisasi penerapan *good governance* (Kepemerintahan yang baik)
    - Peningkatan kualitas pelayanan publik
    - Pengembangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta swasta.

Dari pemaparan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Barru, jelas bahwa pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan daerah hal tersebut terlihat drai perumusan kebijakan yang menempatkan pendidikan menjadi prioritas utama.

3.3.2.1 Kebijakan Pendidikan

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dibawah pimpinan Drs.H.Kamil Ruddin,M.Si. selaku kepala dinas pendidikan kabupaten Barru merumuskan visi dan misi dalam hal pendidikan sebagai berikut :

1. Visi Pendidikan

Pemerintah kabupaten Barru mengupayakan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan bagi masyarakatnya namun tetap dibarengi oleh keimanan agar terciptanya keseimbangan ilmu pengetahuan serta agama. Berdasaran hal tersebut, maka pemerintah kabupaten Barru menetapkan visi pendidian sebagai berikut :

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang kokoh iman dan taqwa unggul ilmu pengetahuan teknologi dan seni bermartabat”.

2. Misi pendidikan

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah kabupaten Barru merumuskan misi pendidikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kebijakan bidang pendidikan pada tingkat pra-sekolah pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah.
2. Mendorong terciptnya penghayatan dan pengalaman keagamaan peserta didik.
3. Memfasilitasi potensi bakat, minat dan keunggulan peserta didik agar berkembang secara optimal
4. Mengembangkan kemandirian, menggalang partisipasi masyarakat dan kerjasama lokal, regional, nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan pemuda olahraga dan seni.

3. Kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi, yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arif Rohman,2009:108).

Dalam hal kebijakan pendidikan, pemerintah kabupaten Barru mengacu pada tujuan pembangunan pendidikan nasional 2005-2009, maka ditetapkan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan mewujudkan lingkungan yang bermakna serta kondusif untuk

terselenggaranya proses belajar-mengajar yang realistis dan berkelanjutan serta dapat menyelamatkan peserta didik dan pengaruh-pengaruh penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, dan perilaku kekerasan.

2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya secara sistemik dalam kaitan dengan peningkatan kemampuan profesional secara integral di dalam keseluruhan manajemen sistem pendidikan nasional, berkaitan dengan fungsi penyediaan guru, penyalahgunaan tenaga guru, penilaian prestasi, serta *civil effect*-nya bagi penempatan kembali, pemindahan serta promosi.
3. Penataan komponen pendidikan persiapan kerja yang berorientasi ke pasar kerja (*market driven*), baik melalui jalur sekolah (SMK) maupun jalur pendidikan luar sekolah (kursus, pelatihan kerja, dan belajar mandiri), untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keterampilan dan keahlian profesional, serta didukung oleh sistem sertifikasi yang profesional.
4. Analisis peluang dan tantangan

Dalam upaya meningkatkan pendidikan di kabupaten Barru, dinas pendidikan setempat telah melakukan evaluasi mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam memajukan pendidikan. Peluang serta tantangan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Berikut pemaparan mengenai peluang dan tantangan bagi kemajuan pendidikan kabupaten Barru :

1) Faktor Internal

A. *Strength* (Kekuatan)

a) Telah memiliki struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas
b) Jumlah Pegawai/Guru sudah memenuhi standar kebutuhan
c) Sebagian tenaga guru telah mengikutu pendidikan sesuai dengan jurusan dan bidangnya
d) Potensi peserta didik secara kuantitatif cukup besar dan secara kualitatif dapat dikembangkan

B. *Weaknes* (Kelemahan)

a) Belum terlaksananya Manajemen Mutu secara simultan
b) Belum terlaksananya pengawasan secara menyeluruh
c) Kesadaran guru dan pegawai dalam menjalankan tugas masih kurang
d) Kualitas dan kuantitas mobile belum memadai

2) Faktor Eksternal

A. *Opportunities* (peluang)

a) Masih adanya bantuan dari pemerintah pusat
b) Keterbukaan institusi/lembaga lain untuk menjalin kerjasama
c) Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam masih tersedia maksimal
d) Tersedianya lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kependidikan

B. *Threats* (ancaman)

a) Kesenjangan antara mutu pendidikan dengan standar mutu yang diinginkan
b) Maraknya penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi dilingkungan sekolah.
c) Budaya asing yang tidak tersaing
d) Globalisasi dan efek negatif tekhnologi informasi

Dari penjelasan mengenai tantangan dan peluang terhadap pendidikan diatas maka dapat terlihat permasalahan yang masih harus diperbaiki seperti permasalahan mengenai kesadaran akan tanggungjawab guru sebagai pengajar masih kurang walaupun jumlahnya telah cuku, selain itu masih adanya kesenjangan antara target yang ditentukan dengan hasil yang dicapai. Namun kekurangan-kekurangan tersebut masih dapat diatasi dengan manfaatkan bantuan dari pemerintah pusat serta adanya bantuan dari pihak asing.

Kabupaten Barru terdiri dari 7 kecamatan dan memiliki 37 sekolah menengah pertama yang terdiri dari 23 sekolah negeri serta 14 sekolah swasta. Berikut penjelasan mengenai jumlah sekolah, jumlah murud, serta jumlah guru yang terdapat di kabupaten Barru :

Tabel 3.3.2.1 (1)
Jumlah Sekolah, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru
Di Tiap Kecamatan TA 2007/2008

Kecamatan	Jumlah SMP		Jumlah Murid		Jumlah Guru
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Tanete Riaja	3	3	1.026	89	140
Pujananting	3	-	442	-	54
Tanete Rilau	3	3	1.309	301	163
Barru	3	1	1.434	263	125
Sopeng Riaja	3	4	743	408	143
Balusu	4	2	769	243	124
Mallusetasi	4	-	908	64	103
Jumlah	**23**	**14**	**6.631**	**1.434**	**852**

Sumber : http://www.barru.go.id/index.php. Diakses tanggal 8 Maret 2010.

Tabel diatas menunjukkan jumlah sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta dari tiap-tiap kecamatan. Dalam penelitian ini, tidak semua kecamatan serta sekolah yang akan diteliti akan tetapi hanya ada 4 kecamatan yang menjadi teget penelitian. Kecamatan tersebut diantaranya kecamatan Tanete Riaja, Barru, Balusu, serta Mallusetasi. Pembatasan penelitian dikarenakan program PRIMA-P hanya mencakup 4 kecamatan tersebut. Selain sekolah negeri dan swasta, program PRIMA-P juga melibatkan MTs dari setiap kecamatan sebagai sekolah target dalam pelaksanaan programnya. Berikut data MTs kabupaten Barru baik yang negeri maupun swasta.

Tabel 3.3.2.1 (2)

Daftar MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Barru

Kecamatan	Nama	Status	Jumlah Siswa
Barru	MTs Mangepang	Negeri	162
Barru	SMP Muhammadiyah Kampung Baru	Swasta	10
Balusu	MTs Pontren DDI Takkaisi	Swasta	68
Ballusu	MTs Guppi Madello	Swasta	21
Balusu	SMP Muhammadiyah Takkalasi	Swasta	33
Mallusetasi	MTs DDI Cilelang	Swasta	108
Soppeng Riaja	MTs DDI Putra Mangkaso	Swasta	83
Soppeng Riaja	MTs DDI Siddo	Swasta	44
Soppeng Riaja	MTs Putri DDI Mangkoso	Swasta	34
Soppeng Riaja	SMP DDI Mangkoso	Swasta	45
Tanete Riaja	MTs At Taufiq Lisu	Swasta	19
Tanete Riaja	MTs Muhammadiyah Ele	Swasta	17
Tanete Riaja	MTs Guppi Ralla	Swasta	15
Tanete Rillau	MTs DDI Pekkae Trilau	Swasta	4
Tanete Rillau	MTs Attaufiq Padelo	Swasta	25
Tanete Rillau	MTs Muhammadiyah Padelo	Swasta	16
Tanete Rillau	MTs Almunawwarah Maddo	Swasta	6

Sumber : http://barru.dapodik.org/index.php (diakses tanggal 23 Juni 2011)

Tabel diatas merupakan data MTs baik yang negeri ataupun swasta yang ada di kabupaten Barru. Dalam pelaksanaan program PRIMA-P tidak semua MTs dilibatkan, akan tetapi hanya ada beberapa MTs yang diikutsertakan dari masing-masing kecamatan.

Table 3.3.2.1 (3)

Daftar MTs Negeri dan Swasta Program PRIMA Pendidikan

Kecamatan	Nama	Status	Jumlah Siswa
Barru	MTsN Mangepang	Negeri	162
Ballusu	MTs DDI Takkalasi	Swasta	68
Ballusu	MTs Guppi Madello	Swasta	21
Mallusetasi	MTs DDI Cilelang	Swasta	108
Tanete Riaja	MTs At Taufiq Lisu	Swasta	19
Tanete Riaja	MTs Muhammadiyah Ele	Swasta	17
Tanete Riaja	MTs Guppi Ralla	Swasta	15

Sumber: *Project Completion Report*, hal 56.

Tabel diatas merupakan daftar MTs baik yang negeri dan swasta yang berasal dari masing-masing kecamatan yang menjadi target program PRIMA Pendidikan di kabupaten Barru.